

Kepemimpinan Nasional Berbasis Pancasila Dan Kejuangan: Strategi Pengelolaan Sumber Daya Sebagai Antitesis Dalam Persaingan Global Yang Eksploitatif

Candra¹, Abdul Rajab², Rudi Andriono³, Budi Setyoko⁴, Tarsisius Susilo⁵

^{1,2,3,4,5}Sekolah Staf dan Komando TNI

candrakusuma996@gmail.com¹, rajzzardiyanto47@gmail.com²,

rudiandriono95@gmail.com³, budisetyoko272@gmail.com⁴, muchsus70@gmail.com⁵

ABSTRACT; *This research analyzes a national leadership model based on Pancasila and struggle values as an alternative strategy for managing national resources in facing exploitative global competition. Using a qualitative descriptive-analytical approach, this study examines how Pancasila principles can be translated into leadership strategies capable of managing natural resources, human resources, and technology sustainably without sacrificing national sovereignty. Research findings indicate that Pancasila-based leadership offers an alternative paradigm that prioritizes social justice, deliberative consensus, and balance between national interests and global responsibilities. This model proves capable of optimizing national resource potential through mutual cooperation approaches, sustainable innovation, and non-hegemonic defense diplomacy. The practical implications of this research include the formulation of a conceptual framework for Indonesia's defense doctrine that is adaptive, character-driven, and relevant to the challenges toward Golden Indonesia 2045.*

Keywords: *Pancasila Leadership, Resource Management, Defense Doctrine, Golden Indonesia 2045, Anti-hegemony.*

ABSTRAK; Penelitian ini menganalisis model kepemimpinan nasional berbasis Pancasila dan nilai-nilai kejuangan sebagai alternatif strategi pengelolaan sumber daya nasional dalam menghadapi persaingan global yang eksploitatif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip Pancasila dapat diterjemahkan menjadi strategi kepemimpinan yang mampu mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi secara berkelanjutan tanpa mengorbankan kedaulatan nasional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan berbasis Pancasila menawarkan paradigma alternatif yang mengedepankan keadilan sosial, musyawarah mufakat, dan keseimbangan antara kepentingan nasional dengan tanggung jawab global. Model ini terbukti mampu mengoptimalkan potensi sumber daya nasional melalui pendekatan gotong royong, inovasi berkelanjutan, dan diplomasi pertahanan yang non-hegemonik. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah tersusunnya kerangka konseptual doktrin pertahanan Indonesia yang adaptif, berkarakter, dan relevan dengan tantangan menuju Indonesia Emas 2045.

Kata Kunci: Kepemimpinan Pancasila, Pengelolaan Sumber Daya, Doktrin Pertahanan, Indonesia Emas 2045, Anti-Hegemoni

PENDAHULUAN

Dinamika geopolitik global kontemporer menunjukkan intensifikasi persaingan antar kekuatan besar yang semakin kompleks dan multidimensional. Era ini ditandai dengan munculnya berbagai model kepemimpinan nasional yang mencerminkan orientasi strategis masing-masing negara dalam mengelola sumber daya dan memproyeksikan kekuatan. Fenomena ini tidak hanya melibatkan aspek ekonomi dan militer, tetapi juga dimensi ideologis, teknologis, dan kultural yang membentuk arsitektur keamanan regional dan global.

Persaingan global yang eksploitatif dewasa ini memperlihatkan kecenderungan beberapa kekuatan besar untuk menerapkan pendekatan hegemonik dalam pengelolaan sumber daya, baik di tingkat domestik maupun internasional. Model kepemimpinan yang bersifat proteksionis, autarkis, atau teknokratis seringkali mengabaikan prinsip-prinsip keadilan global dan keberlanjutan lingkungan demi kepentingan jangka pendek. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk menemukan model kepemimpinan alternatif yang mampu mempertahankan kedaulatan sambil tetap berkontribusi positif terhadap tatanan dunia yang berkeadilan.

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan keragaman budaya yang luar biasa, memiliki posisi strategis dalam konstelasi geopolitik global. Letak geografis Indonesia di persimpangan jalur perdagangan internasional, ditambah dengan potensi demografis berupa bonus demografi yang akan mencapai puncaknya dalam dekade mendatang, menjadikan negara ini sebagai salah satu kekuatan regional yang diperhitungkan. Namun, potensi besar ini harus dikelola dengan bijaksana melalui model kepemimpinan yang tidak hanya efektif secara praktis, tetapi juga konsisten dengan nilai-nilai fundamental bangsa.

Pancasila, sebagai dasar filosofis negara Indonesia, menyediakan kerangka nilai yang komprehensif untuk mengembangkan model kepemimpinan nasional yang berbeda dari paradigma kepemimpinan global yang ada. Lima sila dalam Pancasila - Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia - tidak hanya berfungsi sebagai landasan moral, tetapi juga sebagai

guidance strategis dalam pengambilan keputusan politik dan kebijakan publik.

Nilai-nilai kejuangan yang melekat dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia juga memberikan dimensi tambahan yang penting dalam pembentukan karakter kepemimpinan nasional. Semangat gotong royong, keberanian menghadapi tantangan, dan komitmen terhadap kemerdekaan yang hakiki merupakan aset intangible yang dapat ditransformasikan menjadi kekuatan strategis dalam menghadapi kompleksitas tantangan global kontemporer.

Dalam konteks pertahanan nasional, pengelolaan sumber daya strategis menjadi isu krusial yang menentukan kemampuan suatu negara untuk mempertahankan kedaulatannya. Sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi merupakan tiga pilar utama yang harus dikelola secara sinergis untuk membangun kekuatan pertahanan yang kredibel. Namun, pengelolaan ketiga pilar ini tidak dapat dilakukan secara terpisah dari konteks nilai dan filosofi yang mendasari kepemimpinan nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip Pancasila dan nilai-nilai kejuangan dapat diterjemahkan menjadi model kepemimpinan nasional yang mampu mengelola sumber daya strategis secara optimal tanpa terjebak dalam pola-pola eksploitatif yang merugikan kepentingan jangka panjang bangsa. Lebih lanjut, penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana model kepemimpinan berbasis Pancasila dapat menjadi antitesis terhadap model-model kepemimpinan hegemonik yang mendominasi lanskap geopolitik global saat ini.

Relevansi penelitian ini semakin meningkat seiring dengan semakin dekatnya target pencapaian Indonesia Emas 2045, yang menuntut transformasi fundamental dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Visi Indonesia Emas 2045 tidak hanya mencakup pencapaian target ekonomi tertentu, tetapi juga realisasi dari cita-cita kemerdekaan yang hakiki, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan bermartabat berdasarkan Pancasila.

Urgensi penelitian ini juga diperkuat oleh dinamika regional yang semakin kompleks, khususnya di kawasan Indo-Pasifik yang menjadi arena persaingan strategis antara kekuatan-kekuatan besar dunia. Indonesia, dengan posisinya sebagai kekuatan maritim utama di kawasan ini, memerlukan strategi kepemimpinan yang mampu menavigasi kompleksitas persaingan global tanpa kehilangan identitas dan prinsip-prinsip dasarnya.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Kepemimpinan Transformasional dan Adaptif

Konsep kepemimpinan transformasional yang dikembangkan oleh Burns (1978) dan kemudian diperluas oleh Bass (1985) menekankan kemampuan pemimpin untuk menginspirasi dan memotivasi pengikutnya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dari kepentingan pribadi mereka. Dalam konteks kepemimpinan nasional, pendekatan transformasional menjadi relevan karena kemampuannya untuk menggerakkan seluruh komponen bangsa menuju visi bersama yang mulia.

Bass dan Riggio (2006) mengidentifikasi empat dimensi utama kepemimpinan transformasional: pengaruh ideal (*idealized influence*), motivasi inspirasional (*inspirational motivation*), stimulasi intelektual (*intellectual stimulation*), dan pertimbangan individual (*individualized consideration*). Keempat dimensi ini dapat diadaptasi dalam konteks kepemimpinan nasional Indonesia dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi moral dan etis.

Heifetz (1994) memperkenalkan konsep kepemimpinan adaptif yang menekankan kemampuan untuk menghadapi tantangan kompleks yang tidak memiliki solusi teknis yang jelas. Kepemimpinan adaptif memerlukan kemampuan untuk mengidentifikasi tantangan mendasar, memobilisasi masyarakat untuk menghadapi tantangan tersebut, dan memfasilitasi proses pembelajaran kolektif. Konsep ini sangat relevan dalam konteks Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan multidimensional dalam era globalisasi.

2. Kepemimpinan Strategis Militer dan Doktrin Pertahanan

Yarger (2006) mendefinisikan kepemimpinan strategis sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk secara sukarela membuat keputusan hari demi hari yang meningkatkan viabilitas jangka panjang organisasi, sambil tetap mempertahankan stabilitas jangka pendek. Dalam konteks pertahanan nasional, kepemimpinan strategis melibatkan kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai instrumen kekuatan nasional - diplomatik, informasi, militer, dan ekonomi - dalam mencapai tujuan strategis.

Betz dan Stevens (2011) menekankan pentingnya dimensi etis dalam kepemimpinan strategis militer. Mereka berargumen bahwa kepemimpinan yang efektif tidak hanya memerlukan kompetensi teknis dan taktis, tetapi juga integritas moral yang kuat. Perspektif ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan dimensi etis dan moral dalam setiap

aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Pengelolaan Sumber Daya Strategis dalam Perspektif Keamanan Nasional

Konsep pengelolaan sumber daya strategis dalam konteks keamanan nasional telah mengalami evolusi signifikan seiring dengan perubahan karakteristik ancaman dan tantangan keamanan. Baldwin (1985) memperkenalkan konsep "keamanan ekonomi" yang menekankan pentingnya dimensi ekonomi dalam perhitungan keamanan nasional. Dalam era kontemporer, dimensi ini semakin relevan dengan munculnya berbagai bentuk warfare ekonomi dan persaingan sumber daya yang intensif.

Klare (2001) menganalisis fenomena "resource wars" yang menunjukkan bagaimana persaingan memperebutkan sumber daya alam dapat menjadi sumber konflik dan ketidakstabilan regional. Analisis ini memberikan perspektif penting tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana untuk menjaga stabilitas keamanan nasional dan regional.

Ross (2012) mengembangkan konsep "resource curse" yang menjelaskan bagaimana kelimpahan sumber daya alam justru dapat menjadi beban bagi pembangunan politik dan ekonomi suatu negara jika tidak dikelola dengan baik. Konsep ini memberikan peringatan penting bagi Indonesia untuk mengembangkan strategi pengelolaan sumber daya yang dapat mengoptimalkan manfaat sambil meminimalkan risiko.

4. Pancasila sebagai Filosofi Kepemimpinan

Kaelan (2004) menganalisis Pancasila sebagai sistem filsafat yang komprehensif yang dapat menjadi foundation bagi pengembangan model kepemimpinan nasional yang khas Indonesia. Menurutnya, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi negara, tetapi juga sebagai worldview yang dapat membimbing pengambilan keputusan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Latif (2011) mengembangkan konsep "Pancasila sebagai paradigma" yang menekankan relevansi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi tantangan-tantangan kontemporer. Dalam perspektif ini, Pancasila tidak dipandang sebagai doktrin yang statis, tetapi sebagai framework dinamis yang dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi fundamentalnya.

Darmaputera (1988) mengeksplorasi dimensi etis Pancasila dalam konteks pembangunan nasional. Menurutnya, prinsip-prinsip Pancasila menyediakan guidance moral yang penting

untuk memastikan bahwa proses pembangunan tidak hanya mencapai target kuantitatif, tetapi juga mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

5. Studi Komparatif Model Kepemimpinan Global

Untuk memahami keunikan dan relevansi model kepemimpinan berbasis Pancasila, penting untuk menganalisis berbagai model kepemimpinan yang dominan dalam lanskap geopolitik global. Studi komparatif ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif tentang kelebihan dan keterbatasan berbagai pendekatan kepemimpinan.

Fukuyama (2014) menganalisis fenomena "political decay" dalam demokrasi Barat yang menunjukkan keterbatasan model kepemimpinan liberal dalam menghadapi tantangan kompleks abad ke-21. Analisis ini memberikan insight penting tentang perlunya alternatif model kepemimpinan yang dapat mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut.

Allison (2017) mengembangkan konsep "Thucydides Trap" yang menjelaskan dinamika persaingan antara kekuatan dominan dan kekuatan yang sedang bangkit. Konsep ini relevan untuk memahami konteks geopolitik yang dihadapi Indonesia sebagai emerging power dalam sistem internasional.

Bell (2015) mengkaji model "meritocracy" dalam sistem politik Tiongkok yang menekankan pentingnya kompetensi dan prestasi dalam seleksi kepemimpinan. Meskipun memiliki kelebihan tertentu, model ini juga menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi demokratis dan akuntabilitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji model kepemimpinan nasional berbasis Pancasila dan nilai-nilai kejuangan dalam konteks pengelolaan sumber daya strategis. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada kompleksitas fenomena yang dikaji dan kebutuhan untuk memahami makna mendalam dari konsep-konsep yang diteliti.

1) Desain Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan strategi studi kasus instrumental yang fokus pada pengembangan model kepemimpinan nasional Indonesia. Studi kasus instrumental dipilih karena kemampuannya untuk memberikan insight mendalam tentang fenomena khusus yang memiliki signifikansi teoretis dan praktis yang luas.

2) Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik utama:

Pertama, studi literatur komprehensif yang mencakup analisis terhadap dokumen-dokumen resmi negara, publikasi akademik, laporan strategis, dan sumber-sumber primer lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Studi literatur ini meliputi analisis terhadap teks-teks fundamental seperti Pembukaan UUD 1945, Pancasila, dan dokumen-dokumen strategis nasional lainnya.

Kedua, analisis komparatif terhadap berbagai model kepemimpinan global untuk mengidentifikasi kelebihan dan keterbatasan masing-masing pendekatan. Analisis ini meliputi studi terhadap model kepemimpinan Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, dan negara-negara lain yang memiliki pendekatan khas dalam pengelolaan sumber daya strategis.

Ketiga, sintesis teoretis yang mengintegrasikan berbagai perspektif teoretis dari disiplin ilmu politik, hubungan internasional, manajemen strategis, dan filsafat untuk mengembangkan kerangka konseptual yang komprehensif.

3) Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap yang sistematis:

Tahap Reduksi Data Proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data mentah dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi informasi yang paling relevan dengan pertanyaan penelitian.

Tahap Kategorisasi Pengelompokan data berdasarkan tema-tema utama yang muncul, termasuk dimensi-dimensi kepemimpinan Pancasila, strategi pengelolaan sumber daya, dan implikasi terhadap doktrin pertahanan.

Tahap Interpretasi Proses pemberian makna terhadap pola-pola yang muncul dari data dengan menggunakan kerangka teoretis yang telah ditetapkan.

Tahap Sintesis Pengintegrasian berbagai temuan untuk mengembangkan model kepemimpinan yang koheren dan operasional.

4) Kerangka Analisis

Kerangka analisis dalam penelitian ini dibangun berdasarkan integrasi antara teori kepemimpinan transformasional, konsep kepemimpinan adaptif, dan filosofi Pancasila. Kerangka ini terdiri dari lima dimensi utama:

Dimensi Filosofis Menganalisis bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterjemahkan menjadi prinsip-prinsip kepemimpinan yang operasional.

Dimensi Strategis Mengkaji bagaimana kepemimpinan berbasis Pancasila dapat diimplementasikan dalam konteks pengelolaan sumber daya strategis.

Dimensi Operasional Menganalisis mekanisme konkret untuk mengoperasionalkan model kepemimpinan yang dikembangkan.

Dimensi Komparatif Membandingkan model kepemimpinan berbasis Pancasila dengan model-model kepemimpinan global lainnya.

Dimensi Evaluatif: Menilai efektivitas dan relevansi model yang dikembangkan dalam konteks tantangan masa depan.

5) Validitas dan Reliabilitas

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian, digunakan beberapa strategi:

Triangulasi Sumber Menggunakan berbagai jenis sumber data untuk memverifikasi temuan penelitian.

Triangulasi Teoretis Menggunakan berbagai perspektif teoretis untuk menganalisis fenomena yang sama.

Member Checking Memverifikasi interpretasi peneliti dengan expert dalam bidang terkait.

Audit Trail Mendokumentasikan seluruh proses penelitian untuk memungkinkan verifikasi eksternal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Model Kepemimpinan Pancasila dalam Konteks Global

Analisis terhadap dinamika kepemimpinan global kontemporer menunjukkan dominasi beberapa model yang memiliki karakteristik khas. Model kepemimpinan Amerika Serikat cenderung menekankan supremasi teknologi dan kekuatan ekonomi dengan pendekatan yang seringkali unilateral. Model kepemimpinan Tiongkok mengandalkan efisiensi teknokratis dan mobilisasi sumber daya massal dengan kontrol terpusat yang ketat. Sementara itu, model kepemimpinan Rusia menekankan kemandirian strategis dan eksploitasi sumber daya alam sebagai instrumen geopolitik. Dalam konteks ini, kepemimpinan berbasis Pancasila menawarkan paradigma alternatif yang berbeda secara fundamental. Model ini tidak bertumpu pada dominasi atau eksploitasi, melainkan pada prinsip keseimbangan, keadilan, dan

keberlanjutan. Hal ini tercermin dalam pendekatan Indonesia terhadap berbagai isu global, mulai dari perubahan iklim hingga konflik internasional, yang konsisten menekankan solusi yang menguntungkan semua pihak.

Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan dimensi spiritual yang seringkali absen dalam model kepemimpinan sekuler. Dimensi ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan moral, tetapi juga sebagai sumber kekuatan dalam menghadapi tantangan yang kompleks. Kepemimpinan yang berakar pada nilai-nilai spiritual cenderung lebih stabil dan sustainable karena tidak semata-mata bergantung pada kalkulasi pragmatis jangka pendek.

Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menjadi pembeda utama dalam pengelolaan sumber daya strategis. Berbeda dengan pendekatan eksploitatif yang memprioritaskan ekstraksi maksimal untuk kepentingan nasional sempit, pendekatan berbasis kemanusiaan menekankan tanggung jawab terhadap generasi masa depan dan komunitas global. Hal ini tercermin dalam komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim.

B. Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam

Indonesia memiliki posisi unik sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, mulai dari mineral strategis, minyak dan gas bumi, hingga keanekaragaman hayati yang tidak ternilai. Namun, pengelolaan sumber daya ini menghadapi dilema klasik antara kebutuhan pembangunan ekonomi jangka pendek dengan keberlanjutan jangka panjang.

Model kepemimpinan berbasis Pancasila menawarkan pendekatan yang berbeda melalui prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Prinsip ini menuntut bahwa eksploitasi sumber daya alam harus memberikan manfaat yang adil bagi seluruh rakyat, bukan hanya segelintir elite atau perusahaan multinasional. Implementasi prinsip ini memerlukan transformasi fundamental dalam tata kelola sumber daya alam, mulai dari regulasi hingga mekanisme distribusi keuntungan.

Dalam konteks pertahanan nasional, pengelolaan sumber daya alam memiliki dimensi strategis yang krusial. Kemandirian energi, misalnya, menjadi prasyarat penting untuk menjaga kedaulatan nasional. Namun, pencapaian kemandirian energi tidak boleh dilakukan dengan cara yang merusak lingkungan atau mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. Prinsip musyawarah mufakat dalam Pancasila menyediakan mekanisme untuk memastikan bahwa kebijakan energi nasional memperoleh legitimasi dan dukungan dari masyarakat.

Strategi diversifikasi sumber daya juga menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis sumber daya tertentu. Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan energi terbarukan, mulai dari energi surya, angin, hingga panas bumi. Pengembangan sektor ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap kemandirian energi, tetapi juga positioning Indonesia sebagai leader dalam transisi energi global.

C. Optimalisasi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aset paling berharga yang dimiliki Indonesia. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan bonus demografi yang akan mencapai puncaknya dalam dekade mendatang, Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk menjadi kekuatan ekonomi dan politik global. Namun, potensi ini hanya dapat direalisasikan melalui strategi pengembangan sumber daya manusia yang komprehensif dan berkelanjutan.

Prinsip Persatuan Indonesia dalam Pancasila menekankan pentingnya kohesi sosial dalam mengoptimalkan potensi sumber daya manusia. Keragaman etnis, budaya, dan agama yang menjadi karakteristik Indonesia harus dipandang sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Model kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan keragaman ini akan menghasilkan inovasi dan kreativitas yang luar biasa.

Sistem pendidikan menjadi kunci utama dalam pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan yang berbasis nilai-nilai Pancasila tidak hanya menghasilkan tenaga kerja yang kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki karakter dan integritas yang kuat. Hal ini menjadi penting dalam era digital yang penuh dengan tantangan ethical dan moral.

Pengembangan kapasitas kepemimpinan di berbagai tingkatan juga menjadi prioritas strategis. Indonesia memerlukan pemimpin di berbagai sektor yang tidak hanya kompeten secara profesional, tetapi juga memiliki komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila. Program pengkaderan kepemimpinan yang sistematis dan berkelanjutan menjadi investasi jangka panjang yang sangat strategis.

D. Penguasaan dan Pengembangan Teknologi

Dalam era Revolusi Industri 4.0 dan menuju Society 5.0, penguasaan teknologi menjadi determinan utama kekuatan nasional. Negara-negara yang tidak mampu menguasai teknologi akan menjadi objek eksploitasi oleh negara-negara yang lebih maju secara teknologis. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas teknologi nasional menjadi imperatif strategis yang tidak dapat ditawar.

Model kepemimpinan berbasis Pancasila memberikan perspektif unik dalam pengembangan teknologi. Berbeda dengan pendekatan yang semata-mata menekankan efisiensi dan profitabilitas, pendekatan Pancasila menekankan teknologi yang bermanfaat bagi kemanusiaan dan tidak merusak tatanan sosial. Hal ini tercermin dalam komitmen Indonesia untuk mengembangkan artificial intelligence yang ethical dan responsible.

Strategi pengembangan teknologi nasional harus mencakup tiga pilar utama: penelitian dan pengembangan, transfer teknologi, dan inovasi indigenus. Indonesia tidak boleh hanya menjadi konsumen teknologi asing, tetapi harus mampu mengembangkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik nasional.

Kerjasama internasional dalam bidang teknologi juga menjadi penting, tetapi harus dilakukan dengan prinsip mutual benefit dan tidak menciptakan ketergantungan teknologis. Indonesia harus mampu membangun ekosistem inovasi yang mandiri sambil tetap terbuka terhadap kerjasama yang menguntungkan.

E. Diplomasi Pertahanan dan Soft Power

Kepemimpinan berbasis Pancasila memiliki potensi besar untuk mengembangkan soft power Indonesia di tingkat global. Nilai-nilai universal yang terkandung dalam Pancasila, seperti toleransi, keadilan, dan kedamaian, memiliki daya tarik yang kuat bagi komunitas internasional yang semakin lelah dengan politik power dan dominasi.

Diplomasi pertahanan Indonesia harus mencerminkan karakter kepemimpinan Pancasila yang mengutamakan dialog, kerjasama, dan solusi win-win. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam konstelasi regional, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas dan perdamaian global.

Konsep bebas aktif dalam politik luar negeri Indonesia sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila yang menolak dominasi dan eksploitasi. Dalam konteks persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok, Indonesia dapat memainkan peran sebagai middle power yang memfasilitasi dialog dan kerjasama konstruktif.

F. Implementasi Model Kepemimpinan Pancasila

Implementasi model kepemimpinan berbasis Pancasila memerlukan transformasi sistemik dalam berbagai aspek tata kelola negara. Hal ini mencakup reformasi institusional, pengembangan kapasitas aparatur, dan penguatan sistem checks and balances.

Sistem rekrutmen dan pengembangan pemimpin harus dirancang untuk mengidentifikasi

dan mengembangkan individu-individu yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai Pancasila. Hal ini memerlukan pengembangan assessment tools yang mampu mengukur integritas, empati, dan komitmen terhadap kepentingan publik.

Mekanisme akuntabilitas juga harus diperkuat untuk memastikan bahwa para pemimpin benar-benar mengimplementasikan prinsip-prinsip kepemimpinan Pancasila dalam praktik kepemimpinan mereka. Hal ini mencakup transparansi dalam pengambilan keputusan, partisipasi publik dalam proses kebijakan, dan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif.

G. Tantangan dan Peluang Masa Depan

Implementasi model kepemimpinan berbasis Pancasila menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. Tantangan internal mencakup resistensi dari kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dalam status quo, keterbatasan kapasitas institusional, dan kompleksitas koordinasi antar lembaga.

Tantangan eksternal mencakup tekanan dari kekuatan-kekuatan global yang mungkin tidak nyaman dengan munculnya model kepemimpinan alternatif yang menantang hegemoni mereka. Persaingan ekonomi yang ketat, propaganda informasi, dan berbagai bentuk intervensi soft power dapat menjadi hambatan dalam implementasi model kepemimpinan Pancasila.

Namun, di sisi lain, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan. Semakin banyak negara dan masyarakat global yang mulai mempertanyakan efektivitas model kepemimpinan konvensional dalam mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan konflik internasional. Model kepemimpinan berbasis Pancasila dapat menjadi alternatif yang menarik bagi negara-negara yang mencari paradigma baru dalam tata kelola global.

H. Doktrin Pertahanan Indonesia Emas 2045

Pengembangan doktrin pertahanan menuju Indonesia Emas 2045 harus mencerminkan evolusi paradigma kepemimpinan nasional berbasis Pancasila. Doktrin ini tidak hanya mencakup aspek militer konvensional, tetapi juga dimensi-dimensi baru seperti keamanan siber, ketahanan ekonomi, dan diplomasi pertahanan.

Konsep pertahanan semesta yang telah menjadi karakteristik doktrin pertahanan Indonesia perlu direvitalisasi dengan mengintegrasikan teknologi modern dan pendekatan multidimensional. Setiap warga negara tidak hanya berperan sebagai komponen pertahanan fisik, tetapi juga sebagai guardian nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi berbagai bentuk

ancaman ideologis dan kultural.

Pengembangan kekuatan pertahanan harus diseimbangkan dengan komitmen terhadap perdamaian dan stabilitas regional. Indonesia tidak boleh terjebak dalam arms race yang kontraproduktif, tetapi harus membangun kekuatan pertahanan yang cukup untuk mempertahankan kedaulatan sambil tetap berkontribusi terhadap perdamaian global.

Integrasi sipil-militer dalam doktrin pertahanan juga mencerminkan prinsip persatuan dalam Pancasila. Pertahanan nasional bukan hanya tanggung jawab TNI, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Hal ini memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta.

I. Sinergi Antar Sektor dalam Pengelolaan Sumber Daya

Pengelolaan sumber daya strategis yang efektif memerlukan sinergi yang kuat antar berbagai sektor. Model kepemimpinan berbasis Pancasila menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Hal ini berbeda dengan pendekatan sektoral yang seringkali menghasilkan fragmentasi dan inefisiensi.

Dalam sektor energi, misalnya, diperlukan sinergi antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pertamina, PLN, dan berbagai stakeholder lainnya untuk mengembangkan roadmap energi nasional yang komprehensif. Sinergi ini tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga alignment dalam visi dan nilai-nilai yang mendasari kebijakan energi.

Sektor pertanian dan pangan juga memerlukan pendekatan sinergis yang melibatkan petani, peneliti, industri pengolahan, dan konsumen. Model kepemimpinan Pancasila menekankan pentingnya keadilan dalam rantai nilai pertanian, sehingga petani sebagai produsen primer memperoleh bagian yang fair dari value yang diciptakan.

Sektor maritim, sebagai sektor strategis bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, memerlukan integrasi antara aspek keamanan, ekonomi, dan lingkungan. Pengelolaan laut dan sumber daya kelautan harus dilakukan dengan pendekatan holistik yang mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem, kesejahteraan masyarakat pesisir, dan kepentingan keamanan nasional.

J. Inovasi dalam Tata Kelola Publik

Implementasi model kepemimpinan berbasis Pancasila memerlukan inovasi dalam tata kelola publik yang dapat mengakomodasi partisipasi masyarakat secara meaningful. Prinsip

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan menuntut pengembangan mekanisme-mekanisme baru untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk memperluas dan memperdalam partisipasi publik. Platform digital dapat memfasilitasi dialog antara pemerintah dan masyarakat, mengumpulkan input dari berbagai stakeholder, dan memantau implementasi kebijakan secara real-time. Namun, pemanfaatan teknologi ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa tidak menimbulkan digital divide yang dapat mengeksklusi kelompok-kelompok tertentu.

Konsep smart governance yang mengintegrasikan big data, artificial intelligence, dan internet of things dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola publik. Namun, implementasinya harus konsisten dengan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal perlindungan privasi dan pencegahan surveillance yang berlebihan.

Desentralisasi yang meaningful juga menjadi penting dalam implementasi kepemimpinan Pancasila. Daerah-daerah harus memiliki otonomi yang cukup untuk mengembangkan model kepemimpinan yang sesuai dengan karakteristik lokal, sambil tetap dalam kerangka nilai-nilai Pancasila yang universal.

K. Pembangunan Karakter Bangsa

Kepemimpinan berbasis Pancasila tidak dapat dipisahkan dari upaya pembangunan karakter bangsa secara keseluruhan. Karakter bangsa yang kuat menjadi foundation bagi implementasi model kepemimpinan yang authentic dan sustainable. Hal ini memerlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sistem pendidikan menjadi instrumen utama dalam pembangunan karakter bangsa. Kurikulum pendidikan harus dirancang untuk tidak hanya mengembangkan kompetensi akademik dan teknis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai Pancasila secara mendalam. Hal ini mencakup pengembangan empati, integritas, tanggung jawab sosial, dan komitmen terhadap kepentingan publik.

Media massa dan platform digital juga memiliki peran penting dalam pembentukan karakter bangsa. Konten media yang mempromosikan nilai-nilai positif dan konstruktif dapat berkontribusi terhadap pembentukan opini publik yang sehat dan rational. Sebaliknya, konten yang mempromosikan hatred, intoleransi, dan ekstremisme dapat merusak kohesi sosial dan

menghambat implementasi kepemimpinan Pancasila.

Budaya populer, termasuk film, musik, dan seni, juga dapat menjadi medium yang efektif untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila. Creative industry Indonesia memiliki potensi besar untuk menghasilkan konten yang tidak hanya entertaining, tetapi juga educational dan inspirational.

L. Resiliensi Nasional dalam Menghadapi Krisis

Model kepemimpinan berbasis Pancasila harus terbukti mampu menghadapi berbagai jenis krisis, mulai dari bencana alam, pandemi, krisis ekonomi, hingga konflik sosial. Resiliensi nasional menjadi indikator penting dari efektivitas model kepemimpinan yang dikembangkan. Pengalaman Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 memberikan pelajaran penting tentang pentingnya kepemimpinan yang adaptif dan responsif. Kemampuan untuk mengambil keputusan cepat sambil tetap mempertimbangkan berbagai aspek dan kepentingan menjadi karakteristik penting dari kepemimpinan yang efektif.

Sistem early warning dan preparedness menjadi komponen penting dalam membangun resiliensi nasional. Indonesia, dengan geografis yang rawan bencana, memerlukan sistem yang mampu mengantisipasi dan merespons berbagai jenis ancaman dengan cepat dan efektif.

Kerjasama internasional dalam menghadapi krisis global juga mencerminkan karakter kepemimpinan Pancasila yang mengutamakan solidaritas dan mutual assistance. Indonesia dapat memainkan peran leadership dalam regional disaster management dan global crisis response.

M. Evaluasi dan Monitoring Implementasi

Implementasi model kepemimpinan berbasis Pancasila memerlukan sistem evaluasi dan monitoring yang komprehensif untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan yang ditetapkan dapat tercapai secara efektif. Sistem ini harus mampu mengukur tidak hanya outcome yang terukur secara kuantitatif, tetapi juga perubahan-perubahan kualitatif dalam kultur kepemimpinan dan tata kelola publik.

Pengembangan indikator-indikator yang relevan menjadi challenge tersendiri karena nilai-nilai Pancasila memiliki dimensi yang kompleks dan multifaset. Indikator-indikator ini harus mampu menangkap esensi dari setiap sila Pancasila dalam konteks kepemimpinan dan tata kelola publik.

Partisipasi masyarakat dalam proses monitoring juga menjadi penting untuk memastikan

akuntabilitas dan transparansi. Masyarakat harus memiliki akses terhadap informasi tentang kinerja kepemimpinan dan dapat memberikan feedback yang konstruktif untuk perbaikan berkelanjutan.

Benchmarking dengan best practices dari negara-negara lain juga dapat memberikan insight yang valuable, meskipun harus dilakukan dengan kehati-hatian untuk memastikan relevansi dengan konteks Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini telah mengkaji secara komprehensif model kepemimpinan nasional berbasis Pancasila dan nilai-nilai kejuangan sebagai strategi pengelolaan sumber daya dalam menghadapi persaingan global yang eksploitatif. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa model kepemimpinan berbasis Pancasila menawarkan paradigma alternatif yang fundamental berbeda dari model-model kepemimpinan hegemonik yang mendominasi lanskap geopolitik global.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Pancasila dapat diterjemahkan menjadi strategi kepemimpinan yang operasional dan efektif dalam mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi secara berkelanjutan. Model ini menekankan keseimbangan antara efektivitas pencapaian tujuan nasional dengan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal dan tanggung jawab global.

Dalam aspek pengelolaan sumber daya alam, kepemimpinan berbasis Pancasila menawarkan pendekatan yang mengutamakan keberlanjutan, keadilan distributif, dan partisipasi masyarakat. Berbeda dengan pendekatan eksploitatif yang memprioritaskan ekstraksi maksimal untuk keuntungan jangka pendek, model ini menekankan optimalisasi manfaat jangka panjang dengan tetap mempertahankan integritas ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, model kepemimpinan Pancasila mengintegrasikan pengembangan kompetensi teknis dengan pembentukan karakter dan integritas. Hal ini menghasilkan human capital yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga memiliki komitmen terhadap nilai-nilai sosial dan moral yang menjadi foundation masyarakat yang berkeadaban.

Penguasaan dan pengembangan teknologi dalam kerangka kepemimpinan Pancasila diarahkan untuk tujuan-tujuan yang constructive dan humanistic. Teknologi tidak dipandang

semata-mata sebagai instrumen kekuatan atau dominasi, tetapi sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan memecahkan masalah-masalah kemanusiaan.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah tersusunnya kerangka konseptual untuk pengembangan doktrin pertahanan Indonesia yang adaptif, berkarakter, dan relevan dengan tantangan menuju Indonesia Emas 2045. Doktrin ini tidak hanya mencakup aspek pertahanan konvensional, tetapi juga dimensi-dimensi baru seperti ketahanan ekonomi, keamanan siber, dan diplomasi pertahanan.

Model kepemimpinan berbasis Pancasila juga terbukti memiliki potensi besar untuk mengembangkan soft power Indonesia di tingkat global. Nilai-nilai universal yang terkandung dalam Pancasila memiliki daya tarik yang kuat bagi komunitas internasional yang semakin mencari alternatif terhadap model-model kepemimpinan yang hegemonik dan eksploitatif.

Namun, implementasi model ini juga menghadapi berbagai tantangan yang significant, baik internal maupun eksternal. Tantangan internal mencakup resistensi dari berbagai kelompok kepentingan, keterbatasan kapasitas institusional, dan kompleksitas koordinasi antar lembaga. Tantangan eksternal mencakup tekanan dari kekuatan-kekuatan global yang mungkin merasa terancam oleh munculnya paradigma kepemimpinan alternatif.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan komitmen political yang kuat, investasi jangka panjang dalam pengembangan kapasitas, dan strategi komunikasi yang efektif untuk membangun konsensus nasional. Selain itu, diperlukan juga diplomasi yang cerdas untuk membangun understanding dan dukungan internasional terhadap model kepemimpinan yang dikembangkan.

Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa area yang memerlukan penelitian lanjutan, termasuk pengembangan indikator-indikator kinerja yang spesifik untuk mengukur efektivitas kepemimpinan berbasis Pancasila, studi komparatif yang lebih mendalam dengan model-model kepemimpinan dari negara-negara lain, dan analisis empiris tentang dampak implementasi model ini terhadap berbagai indikator pembangunan nasional.

Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini berkontribusi terhadap pengayaan literature tentang alternative models of governance dan leadership yang relevan tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara berkembang lainnya yang mencari paradigma pembangunan yang authentic dan sustainable.

Sebagai penutup, model kepemimpinan nasional berbasis Pancasila dan nilai-nilai kejuangan menawarkan blueprint yang promising untuk menghadapi kompleksitas tantangan

global abad ke-21. Model ini tidak hanya memiliki potensi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya strategis Indonesia, tetapi juga untuk berkontribusi terhadap terbentuknya tatanan global yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Realisasi potensi ini memerlukan komitmen kolektif dari seluruh komponen bangsa dan strategi implementasi yang systematic dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Allison, G. (2017). *Destined for War: Can America and China Escape Thucydides's Trap?* Boston: Houghton Mifflin Harcourt.
- Baldwin, D. A. (1985). *Economic Statecraft*. Princeton: Princeton University Press.
- Bass, B. M. (1985). *Leadership and Performance Beyond Expectations*. New York: Free Press.
- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). *Transformational Leadership* (2nd ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Bell, D. A. (2015). *The China Model: Political Meritocracy and the Limits of Democracy*. Princeton: Princeton University Press.
- Betz, D., & Stevens, T. (2011). *Cyberspace and the State: Toward a Strategy for Cyber-Power*. London: Routledge.
- Burns, J. M. (1978). *Leadership*. New York: Harper & Row.
- Darmaputera, E. (1988). *Pancasila dan Pencarian Identitas Nasional*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Fukuyama, F. (2014). *Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Heifetz, R. A. (1994). *Leadership Without Easy Answers*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Kaelan. (2004). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Klare, M. T. (2001). *Resource Wars: The New Landscape of Global Conflict*. New York: Metropolitan Books.
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ross, M. L. (2012). *The Oil Curse: How Petroleum Wealth Shapes the Development of Nations*. Princeton: Princeton University Press.
- Yarger, H. R. (2006). *Strategic Theory for the 21st Century: The Little Book on Big Strategy*.

Carlisle, PA: Strategic Studies Institute